



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILU 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia Kotak dan Bilik Suara, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 997/HM.03.1-SD/07/SJ/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILU 2019

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019

1. Nama : Rahim Noor
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Wawan Gunawan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Fandu Dwiadma O.
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Andi Rosjadi
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Teguh Prasetyo
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Anak Agung Semara Putra
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
7. Nama : I Nyoman Danan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Muhammad Harris
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019

1. Nama : Rizqi Imam Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Tri Rokhmatun Sobiroh
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Kotak dan Bilik Suara;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
 - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang

- digunakan;
- i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Kotak dan Bilik Suara; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Kotak dan Bilik Suara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU;
2. Anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
3. Kepala LKPP;
4. Sekretaris Jenderal KPU;
5. Sekretaris Utama LKPP;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.